BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan dari 913 pada 2022 menjadi 1.010 pada pertengahan 2023, atau tumbuh sebesar 21,9%. Pertumbuhan ini juga tercermin dalam nilai ekspor pada produk kosmetik, wewangian, dan *essential oils* yang mencapai USD 770,8 juta pada periode Januari–November 2023.¹ Angka tersebut menunjukkan adanya daya saing industri kosmetik nasional di pasar global. Beralih ke sektor industri kosmetik dalam negeri, dominasi produk lokal semakin kuat, tercermin dari distribusi produk pada 2021 yang terdiri atas 55,57% produk lokal, 34,11% produk impor, dan 10,32% produk kontrak.² Dari tahun 2018 hingga 2022, kategori produk *personal care* dan kosmetik ini terus masuk dalam tiga besar produk terlaris di *marketplace*, dengan total nilai transaksi mencapai Rp13.287,4 triliun dan volume transaksi sebanyak 145,44 juta. Dengan tren positif yang berkelanjutan, industri kosmetik Indonesia memiliki peluang besar untuk terus maju dan bersaing di kancah global.³

Tren positif juga terlihat dari peningkatan jumlah notifikasi kosmetika yang meningkat dari 63.816 pada 2020, 82.716 pada tahun 2021, dan kemudian 47.680

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Siaran pers HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2024*, Tangerang 3 Februari 2024, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung-penguatan-blue-economy>, diakses 9 Mei 2025, pukul 10.59.

² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Dataset “Persentase Produk Kosmetik Lokal dan Impor”*, 1 Oktober 2021. <https://satudata.pom.go.id/datasets/9-persentase-produk-kosmetik-lokal-dan-impor?lang=id&tabs=tabs2>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.56.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Loc. cit.*

pada tahun 2022.⁴ Angka ini terus bertambah hingga mencapai 116.198 pada 2024.⁵ Selain itu, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memperoleh izin edar kosmetik pada tahun 2024 terdiri dari 26.339 usaha kecil dan 15.541 usaha menengah.⁶ Pertumbuhan ini mencerminkan inovasi dan diversifikasi produk yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar.

Di tengah pertumbuhan industri yang menjanjikan, muncul permasalahan terkait peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut sebagai BPOM) menemukan bahwa dalam periode September 2022 hingga Oktober 2023, terdapat 181 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan total 1,2 juta *pieces*. Nilai keekonomian produk ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp39 miliar.⁷ Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPOM pada klinik kecantikan di berbagai daerah menemukan bahwa sekitar 33% dari 731 klinik yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari peredaran kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang mengandung bahan dilarang, hingga produk kedaluwarsa. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun industri

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Dataset “Jumlah Notifikasi Kosmetik Selama 3 Tahun Terakhir”*, 9 Oktober 2024. <https://satudata.pom.go.id/datasets/9-persentase-produk-kosmetik-lokal-dan-impor?lang=id&tabs=tabs2>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.55

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Dataset “Jumlah Nomor Notifikasi Kosmetika – 2024”*, 17 Desember 2024. <https://satudata.pom.go.id/datasets/199-jumlah-nomor-notifikasi-kosmetika---2024?lang=id&tabs=tabs1>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.55.

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Dataset “Jumlah Industri Kecil dan Menengah Yang Memperoleh Izin Edar Kosmetik 2024”*, 17 Desember 2024. <https://satudata.pom.go.id/datasets/205-jumlah-industri-kecil-dan-menengah-yang-memperoleh-izin-edar-kosmetik-2024?lang=id&tabs=tabs2>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.55.

⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Berita “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya”*, 9 Desember 2023. <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.55.

kosmetik mengalami kemajuan pesat, regulasi dan pengawasan masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapatkan penanganan.⁸

Di satu sisi, meningkatnya persaingan dalam industri kosmetik menjadikan strategi pemasaran yang efektif sebagai faktor kunci bagi perusahaan untuk memenangkan pasar.⁹ Salah satu pendekatan yang semakin berpengaruh adalah pemasaran digital yang memungkinkan merek menjangkau audiens lebih luas serta menyampaikan informasi produk dengan lebih rinci.¹⁰ Konsumen masa kini tidak hanya mempertimbangkan merek dan harga, tetapi juga mencari transparansi terkait komposisi, klaim manfaat, serta keamanan produk sebelum memutuskan pembelian.¹¹ Dengan demikian, label pada kemasan produk memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Informasi yang tercantum, seperti komposisi, klaim manfaat, harga, dan peringatan, memberikan detail yang diperlukan untuk membantu konsumen memilih produk yang sesuai.¹²

Informasi yang jelas dan akurat pada kemasan dapat memperkuat persepsi konsumen terhadap produk, meningkatkan rasa percaya diri dalam keputusan pembelian, serta mendorong loyalitas terhadap merek.¹³ Korelasi positif antara

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Berita "Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan"*, 4 April 2024. <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.55.

⁹ Silvia Ekasari, 'Local Cosmetics Marketing Strategy Based on Digitization to Boost Sales', *International Journal of Economic Literature*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 729.

¹⁰ Syukron et al., 'Strategi Pemasaran Produk di Era Digital pada UMKM', *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 160.

¹¹ H. Van Tran dan A. V. Tran, 'Factors Affecting the Choice of Rohto Vietnam Company's Acnes Product Line', *Humanities and Social Sciences Letters*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 71.

¹² Anggia Febriyana Idemon dan Puspita Chairun Nisa, 'The Effect of Brand Equity on Brand Loyalty to Skincare Products Mediated By Customer Satisfaction', *PARADIGMA: Scientific Studies on Science, Religion, and Culture*, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 14.

¹³ Feliks A. B. K. Panjaitan dan Hotman Panjaitan, 'The Role of Customer Value as Intervening in Repurchase Decisions: The Case of Skincare Indonesia', *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 14, No. 1, Februari 2024, hlm. 74.

transparansi informasi pada kemasan dan keputusan pembelian menunjukkan bahwa konsumen menghargai kejelasan dan keterbukaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat daya saing produk di pasar.¹⁴ Oleh karena itu, perusahaan kosmetik perlu membangun kepercayaan melalui komunikasi yang jelas, inovasi produk berkualitas, serta strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.¹⁵

Di tengah dinamika pertumbuhan industri dan meningkatnya tuntutan akan transparansi informasi, muncul problematika hukum berupa penyimpangan informasi pada label kosmetik, atau dikenal sebagai *mislabeleding*. Praktik ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kewajiban hukum pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, serta konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran.

Kesalahan dalam informasi produk kosmetik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komposisi yang tidak akurat hingga penggunaan klaim yang menyesatkan. Beberapa produk mencantumkan atau menghilangkan bahan tertentu yang sebenarnya tidak ada atau terkandung dalam formulasi, sedangkan klaim manfaat yang berlebihan sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai.¹⁶ Contoh kasus yang terjadi adalah adanya tindakan *relabelling* (mengubah penandaan) pada kemasan *line skincare* “White Tomato” dengan nomor izin edar (NIE) POM SD211330691 yang diproduksi PT Imedco Djaja dan

¹⁴ O. Sabri et al., ‘When Is Transparent Packaging Beneficial?’, *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol. 48, No. 8, 2020, hlm. 784.

¹⁵ Silvia Ekasari, *Loc.Cit.*

¹⁶ Hanif Fil’ Awalina dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, ‘Consumer Legal Protection for Overclaimed Skincare Products’, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 32.

diedarkan CV Athena Mandiri Group. Pada kasus ini, pelaku usaha menempelkan stiker bergambar tomat putih dan tulisan “White Tomato”, sedangkan dalam komposisinya, pelaku usaha tidak dapat membuktikan keberadaan kandungan tersebut.¹⁷ Sama halnya seperti yang terjadi pada merek Daviena Skincare. Pada beberapa video *marketing*, merek ini mengklaim bahwa salah satu produknya, yakni “Daviena Sleeping Mask Retinol Booster” memiliki kandungan *Actosome Retinol* sebesar 2%. Namun pada akhirnya, hasil lab justru menunjukkan jika produk tersebut hanya mengandung 0,03 *Pure Retinol* yang mana setara dengan 1% *Actosome Retinol*.¹⁸

Beranjak dari kasus *overclaim*, terdapat juga kasus serupa dimana terdapat total 91 merek kosmetik (salah satunya adalah 24K Essence, Gecomo, Acne Forte, Glow Express, dll.) dipaksa untuk ditarik dari peredaran karena terdapat bahan berbahaya seperti *merkuri* dan *hydroquinone*. Padahal didalam kemasan tidak terdapat pencantuman bahan dan klaim yang diberikan merupakan klaim yang berlebihan.¹⁹ Tindakan seperti pemalsuan sertifikasi logo halal, organik, atau *cruelty-free* tanpa izin resmi, juga menjadi permasalahan yang merugikan konsumen.²⁰ Padahal logo halal saat ini menjadi poin penting untuk daya saing

¹⁷ Liputan 6, 11 Maret 2025, Desideria, B., “*Langgar Relabelling dan Overclaim, BPOM Tarik Izin Edar Suplemen Kesehatan WT White Tomato*”. <https://www.liputan6.com/health/read/5955872/langgar-relabelling-dan-overclaim-bpom-tarik-izin-edar-suplemen-kesehatan-wt-white-tomato>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.59.

¹⁸ Astrid Dyah Ernanda et.al., “Legal Perspectives on Consumer Protection and Overclaims in Skincare Products during the Cancel Culture Era”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 3, No.1, 2025 hlm. 76.

¹⁹ Detikbali, 22 Februari 2025, Nafilah S., “Daftar 91 Merek Kosmetik Berbahaya yang Ditarik BPOM, Jangan Sampai Tertipu”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7791063/daftar-91-merek-kosmetik-berbahaya-yang-ditarik-bpom-jangan-sampai-tertipu> , diakses pada 9 Mei 2025, pukul 10.59.

²⁰ Ayudewi et al., ‘Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam’, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2023, hlm. 430.

perdagangan di Internasional.²¹ Disisi lain, ketidaksesuaian bahasa dalam pelabelan, misalnya tidak adanya informasi dalam Bahasa Indonesia untuk produk yang dijual di Indonesia, dapat menghambat pemahaman konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.²²

Praktik seperti ini tidak hanya menyesatkan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Banyak konsumen yang mempercayai klaim produk secara langsung tanpa mengecek lebih lanjut, sehingga mereka dapat terjebak dalam penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan mengandung bahan yang berisiko bagi kesehatan.²³ Di sisi lain, kerugian materiil juga dialami oleh konsumen mengingat dengan harga tersebut, konsumen seharusnya memperoleh barang dengan kualitas yang lebih baik atau setidaknya sesuai dengan komposisi yang tercantum pada label maupun kemasannya. Sebaliknya, bagi pelaku usaha, *mislabeled* dapat berdampak negatif terhadap reputasi merek mereka. Konsumen yang merasa tertipu kemungkinan besar tidak akan melakukan pembelian ulang dan bahkan dapat menyebarkan pengalaman buruk mereka kepada orang lain, yang akhirnya merusak citra merek tersebut.²⁴

Dalam hukum perdata, terdapat suatu konsep bernama “Perbuatan Melanggar Hukum” atau *onrechtmatige daad*. Konsep ini berarti bahwa setiap perbuatan yang

²¹ Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan”, *Widyapranata: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 51

²² Grant Packard, Yang Li, dan Jonah Berger, ‘When Language Matters’, *Journal of Consumer Research*, Vol. 51, 2024, hlm. 649.

²³ Nadila Novalyn Karim, Mutia Ch. Thalib, dan Julius T. Mandjo, ‘Penghambat Pencantuman Label terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia’, *JCS: Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2, No. 6, Juni 2023, hlm. 1482.

²⁴ Marcella Liliana, “Pengaruh Brand Image dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Konsumen E-Commerce Blibli.com di Jakarta,” *Skripsi*, Program Studi Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Maret 2023, hlm. 6.

melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan, bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁵ Dengan demikian, *mislabeled* pada produk kosmetik dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum apabila informasi yang tercantum pada label terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sejalan dengan tersebut, hukum perdata juga mengenal prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat merupakan kedudukan hukum seseorang atau badan hukum yang wajib memberikan kompensasi atau mengganti kerugian akibat suatu peristiwa hukum, seperti perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Prinsip ini mengatur bahwa pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya.²⁶ Pelaku usaha yang terbukti melakukan *mislabeled* dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa *mislabeled* dalam produk kosmetik tidak hanya dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian karena cacat kehendak, tetapi juga menjadi dasar tanggung gugat pelaku usaha atas perbuatan melanggar hukum.

²⁵ Pasal 1365 KUH Perdata

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 220.

²⁷ Pasal 1367 KUH Perdata

Belum banyak kajian yang secara khusus membahas *mislabeled* sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum dalam konteks hukum perdata murni, terutama ditinjau dari unsur-unsur *onrechtmatige daad*, cacat kehendak dalam perjanjian, serta prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Di sisi lain, Hingga penelitian ini disusun, belum ditemukan putusan pengadilan yang menjadikan praktik *mislabeled* dalam kosmetik sebagai dasar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdato), Hal ini menunjukkan adanya celah akademik yang perlu ditelaah lebih lanjut guna memperluas cakupan penerapan asas-asas hukum perdata terhadap fenomena aktual. Oleh karena itu, penelitian skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MISLABELING PADA INDUSTRI KOSMETIK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**” ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum perdata, khususnya dalam menghadapi kompleksitas praktik perdagangan modern yang mengandalkan informasi sebagai elemen utama dalam transaksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diketahui rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori yang menentukan suatu produk kosmetik dapat dikategorikan sebagai produk *mislabeled* yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan hukum perdata di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk tanggung gugat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang terbukti mengalami *mislabeled*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik yang menjadi dasar dalam menentukan suatu produk kosmetik dapat dikategorikan sebagai produk *mislabeled* yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung gugat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang terbukti mengalami *mislabeled* berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi akademis di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum perdata. Secara spesifik, penelitian ini membahas bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang mengalami *mislabeled* berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang mengkaji bentuk perbuatan melanggar hukum atas *mislabeled* produk dalam industri kosmetik serta kewajiban tanggung gugat pelaku usaha ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang aplikatif bagi pihak terkait dalam menangani permasalahan hukum yang timbul akibat kerugian konsumen, berdasarkan perspektif perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
"Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Atas Barang Kosmetik" yang disusun oleh Hadi, Naufal Akbar Kusuma, dan Nuswardhani dalam Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2021.	Fokus kajian sama-sama menyoroti adanya suatu perbuatan yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan berfokus pada aspek tanggung jawabnya dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang dipakai sama menggunakan <i>normative - statute approach</i> .	Penelitian ini membahas adanya tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada para pihak dalam pelaksanaan jual beli kosmetik secara online dan tidak membahas secara komprehensif mengenai perbuatan melanggar hukum serta <i>mislabeled</i> .
"Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Melalui Lokapasar; Shopee, Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan	Memiliki persamaan, yakni sama sama menyoroti adanya perkembangan industri kosmetik yang sangat	Memiliki perbedaan atas fokus dan tolak ukur analisis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

<p>Konsumen” yang disusun oleh Wilma Laura Sahetapy dan Sri Astutik dalam artikel pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8, No. 1 Tahun 2023.</p>	<p>signifikan di Indonesia yang kemudian membuka kemungkinan akan terjadi suatu isu hukum baru. Serta sama-sama memuat adanya bentuk “tanggung jawab” dari Pelaku usaha atas suatu produk.</p>	<p>pendekatan dari Hukum Perdata, bukan Hukum Perlindungan Konsumen dan berfokus pada analisis adanya perbuatan melanggar hukum yang kemudian memunculkan kewajiban tanggung gugat oleh Pelaku Usaha.</p>
<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pada Produk Perawatan Kulit (Skincare) oleh Ni Komang Mastrini dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram tahun 2023.</p>	<p>Memiliki persamaan dalam hal objek penelitian, yakni adanya suatu “perbuatan” yang pada intinya membuat suatu informasi atas sebuah produk kosmetik/<i>skincare</i> menjadi tidak benar dan merugikan konsumen. Metode penelitian yang dipakai sama menggunakan <i>normative - statute approach</i>.</p>	<p>Memiliki perbedaan atas fokus dan tolak ukur analisis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dari Hukum Perdata, bukan Hukum Perlindungan Konsumen dan berfokus pada analisis adanya perbuatan melanggar hukum yang kemudian memunculkan kewajiban tanggung gugat oleh Pelaku Usaha.</p>
<p>“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan</p>	<p>Kedua penelitian membahas adanya perbuatan melanggar</p>	<p>Memiliki perbedaan atas objek penelitian. Pada penelitian ini</p>

<p>Oleh Produsen Terhadap Konsumen Atas Tidak Terpenuhi Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik” yang disusun oleh Farrel Asyrofil Ubaidillah dalam Skripsi Program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, pada tahun 2025.</p>	<p>hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha atas suatu produk berupa tidak adanya keterbukaan informasi. Metode penelitian yang dipakai sama menggunakan <i>normative - statute approach</i>.</p>	<p>peneliti menggunakan objek penelitian produk kosmetik, bukan rokok elektrik.</p>
---	---	---

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil komparasi dengan penelitian-penelitian terdahulu, skripsi ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus analisis yang secara spesifik mengkaji perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa *mislabeleding* produk kosmetik, yang menimbulkan kewajiban tanggung gugat bagi pelaku usaha dalam perspektif Hukum Perdata. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha kosmetik, sedangkan objek penelitian adalah perbuatan *mislabeleding* yang menyebabkan kerugian hukum bagi konsumen. Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan analisis pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan implikasi tanggung gugat perdata, yang belum banyak dikaji secara mendalam pada penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks industri kosmetik di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas berbasis disiplin ilmiah yang bertujuan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta serta hubungan dalam bidang hukum. Melalui penelitian ini, prinsip ilmu hukum dapat dikembangkan dan metode ilmiah dapat diterapkan untuk memahami serta merespons fakta dan hubungan hukum yang ada.²⁸

Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui peristiwa atau fenomena hukum yang telah atau sedang terjadi, memecahkan permasalahan hukum, serta menguji validitas suatu teori hukum.²⁹ Namun, berbeda dengan penelitian dalam ilmu sosial dan ilmu alam, penelitian hukum tidak bertujuan untuk melakukan verifikasi atau pengujian hipotesis secara empiris. Beberapa ahli hukum bahkan menyatakan bahwa dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah "data" sebagaimana dalam penelitian ilmiah lainnya.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang menelaah hukum dari perspektif internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek utama kajian. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsekuensi hukum dari suatu produk hukum yang dikeluarkan

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Oase Group, 2020, hlm. 8.

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, dMukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 14.

oleh lembaga otonom.³¹ Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma yang mencakup asas hukum, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis karakteristik individu, keadaan, atau gejala hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Metode deskriptif digunakan sebagai pendekatan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji.³³ Dalam penelitian ini, studi kasus diterapkan guna mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum terkait adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas kasus produk *mislabeled* dalam industri kosmetik.

Dengan demikian, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah pelaku usaha dapat dimintai tanggung gugat atas maraknya kasus produk *mislabeled* dalam industri kosmetik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisisnya dengan membandingkannya terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

³¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 28.

³² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, *Op.Cit.* hlm. 29.

³³ Ika Atikah, *Op.Cit.* hlm. 24.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.³⁴ Pendekatan ini dianggap tepat karena dapat memberikan gambaran analitis mengenai kesesuaian, konsistensi, atau inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar, serta antara regulasi dengan undang-undang.³⁵ Selain itu, melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi apakah terdapat benturan filosofis antara peraturan yang berlaku dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, yang bertujuan menelaah konsep hukum melalui doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁶ Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, yaitu mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen atas adanya kasus kasus *mislabeled* dalam industri kosmetik serta apa bentuk tanggung gugatnya. Kombinasi *statute approach* dan *conceptual approach* dianggap relevan karena penelitian ini

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 177

berfokus pada pengkajian regulasi yang mengatur tentang bentuk perbuatan melanggar hukum serta tanggung gugat pelaku usaha.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum sebagai bahan untuk menjelaskan rencana penelitian yang berjenis yuridis normatif, berikut beberapa jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, dan putusan – putusan hakim.³⁷ Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 181

- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika.
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji tinjauan kepustakaan serta istilah-istilah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.³⁸ Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu seperti skripsi yang membahas bentuk perbuatan melanggar hukum, tanggung gugat, *mislabeleding*, dan isu hukum lain yang relevan, termasuk perkembangannya.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, surat kabar, artikel internet, serta video yang diunggah di berbagai *platform* seperti YouTube dan TikTok.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 205

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengunduh seluruh regulasi terkait melalui portal resmi lembaga yang berwenang, kemudian merangkum pasal-pasal yang relevan sebagai dasar analisis. Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, dengan lini masa penelitian berlangsung dari 1 Desember 2024 hingga 10 Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang tidak memerlukan pengumpulan data di lapangan, melainkan sepenuhnya mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam analisis hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu produk mengalami *mislabeling*. Analisis didasarkan pada kajian terhadap regulasi, penelitian terdahulu, serta etimologi dan kasus nyata yang relevan. Kasus-kasus yang dianalisis dipilih dan diinventarisasi menggunakan sumber hukum tersier, seperti artikel, berita, serta video dari berbagai *platform*, termasuk YouTube dan TikTok. Selanjutnya, penelitian mengkaji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, unsur penipuan (*bedrog*), yang kemudian dapat mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli karena adanya cacat kehendak. Selain itu, akan

dianalisis pula kemungkinan terjadinya wanprestasi yang kemudian dapat dimintakan tanggung gugatnya.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, penelitian selanjutnya menelaah mekanisme penyelesaian sengketa sesuai rumusan masalah kedua dengan mengkaji bagaimana bentuk kerugian dan bentuk tanggung gugat yang sesuai. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara runtut dan sistematis agar setiap bagian saling berkaitan dalam membahas isu hukum yang diangkat:

- a. Bab I (Pendahuluan): Bab ini membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian, batasan konsep, metode, serta sistematika penulisan. Latar belakang menyoroti urgensi maraknya kasus produk kosmetik yang memuat unsur *mislabeleding*, yang kemudian menimbulkan isu hukum terkait adanya perbuatan melanggar hukum oleh pelaku usaha. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, Tinjauan pustaka mencakup tentang tinjauan umum mengenai hukum perdata, perbuatan melanggar hukum, *mislabeleding*, serta tanggung gugat beserta teorinya.
- b. Bab II : Bab ini akan membahas tentang karakteristik yang menjadi dasar dalam menentukan suatu produk kosmetik dapat dikategorikan sebagai

produk *mislabeled* yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Pada sub-bab pertama peneliti akan membahas tentang kategori produk kosmetik yang termasuk *mislabeled* dan sub-bab kedua peneliti akan menganalisis terkait adanya pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum terhadap *mislabeled* pada produk kosmetik.

- c. Bab III : Bab ini akan membahas tentang bentuk tanggung gugat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang terbukti mengalami *mislabeled* dan akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Pada sub-bab pertama peneliti akan membahas tentang dasar hukum dan prinsip tanggung gugat dalam kasus *mislabeled* pada produk kosmetik dan sub-bab kedua peneliti akan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen guna memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak.
- d. Bab IV (Penutup): Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan merangkum hasil pembahasan terkait isu hukum yang dikaji, sedangkan saran diberikan baik untuk pengembangan akademis maupun sebagai rekomendasi perbaikan regulasi di masa mendatang

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Perdata

1.7.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

R. Subekti mendefinisikan Hukum Perdata sebagai hukum pokok yang mengatur tentang adanya kepentingan dari seseorang.⁴⁰ Lebih lanjut, Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan Hukum Perdata sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dalam masyarakat yang saling memerlukan dan saling membutuhkan perlindungan hukum dalam bidang privat.⁴¹ Maka dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya sifat privat dan individualistik atas interaksi yang terjadi antara pihak-pihak dengan kedudukan yang sederajat, tanpa adanya intervensi dari negara kecuali sebagai penegak keadilan.⁴² Dalam struktur sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), hukum perdata menjadi cabang hukum yang fundamental karena menyangkut hak-hak dan kepentingan pribadi warga negara.⁴³

Secara normatif, hukum perdata di Indonesia bersumber pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW) yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melalui asas konkordansi. Keberlakuan KUH Perdata ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta Pasal 1 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*), yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum kemerdekaan

⁴⁰ Subekti, R. (2009). *Hukum perdata I*. Jakarta: Intermasa. hlm. 6

⁴¹ Soediman Kartohadiprojo. (2010). *Pengantar hukum perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 10

⁴² Anajeng Esri Edhi Mahanani, Firza Prima Aditiawan, dan Teddy Prima Anggriawan, "Strengthening Community Legal Awareness Toward Consumer Protection Laws Through the Utilization of Information Technology", *Proceeding of the 5th International Seminar of Research Month 2020*, Vol. 2021, hlm. 243

⁴³ Nugroho, D. W. (2015). Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental terhadap hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol, 45, No. 2, hlm. 365

tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru. KUH Perdata secara sistematis terbagi menjadi 4 (empat) buku utama, yakni:

- a. Buku I yakni tentang Orang (*Van Personen*): Buku ini secara keseluruhan membahas tentang status dan kapasitas hukum seseorang, termasuk hak-hak dan kewajiban yang melekat pada individu sebagai subjek hukum. Di dalamnya juga diatur mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan orang, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwalian;
- b. Buku II yakni tentang Benda (*Van Zaken*): Buku ini secara keseluruhan membahas tentang hak-hak atas benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai kepemilikan, hak tanggungan, hak pakai, dan hak-hak lain yang berhubungan dengan benda;
- c. Buku III yakni tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*): Buku ini secara keseluruhan membahas tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, terutama yang timbul dari perjanjian dan perbuatan melanggar hukum. Buku ini juga mengatur syarat sahnya perikatan, pelaksanaan, wanprestasi, dan akibat hukum dari perikatan tersebut;
- d. Buku IV yakni tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*): Buku ini secara keseluruhan membahas tentang aturan-aturan mengenai cara membuktikan suatu hak atau peristiwa hukum dalam proses perdata serta ketentuan mengenai daluwarsa atau kadaluwarsa hak-hak tertentu sehingga tidak dapat lagi dituntut secara hukum.

1.7.1.2 Asas-Asas dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam pembuatan perjanjian dan dalam menentukan hubungan

hukum antar pihak. Asas-asas tersebut termuat dalam KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

a. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dengan tujuan yang sah, serta dilakukan secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak perlu dibuat dalam bentuk tertentu, selama ada kesepakatan yang jelas dari para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan hak kepada setiap individu untuk bebas membuat perjanjian dengan siapa pun dan mengenai apa pun, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan yang kemudian tidak menjadikannya sebagai objek dengan kausa yang halal.⁴⁵ Lebih lanjut, asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat, objek perjanjian, bentuk perjanjian dan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁴⁶

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

⁴⁴ Pasal 1320 KUH Perdata

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 111

Asas *pacta sunt servanda* tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. *Pacta sunt servanda* memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur.⁴⁷ Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.⁴⁸

d. Asas Itikad Baik

Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (objektif) dan bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak (subjektif).⁴⁹

1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata

1.7.2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Istilah perbuatan melanggar hukum bukanlah satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan dari

⁴⁷ Pasal 1338 KUH Perdata

⁴⁸ Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 245

⁴⁹ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018, hlm. 7

“*onrechtmatige daad*” melainkan masih ada istilah-istilah lainnya seperti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang melanggar hukum, dan penyelewengan perdata.⁵⁰ Di sisi lain, Munir Fuady mendefinisikan perbuatan melanggar hukum:

Perbuatan melanggar hukum sebagai kumpulan asas-asas hukum yang berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengendalikan perilaku yang membahayakan, menetapkan tanggung gugat atas kerugian yang timbul dalam hubungan sosial, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan melalui instrumen gugatan perdata yang sesuai.⁵¹

Pendapat mengenai definisi Perbuatan Melanggar Hukum juga dijelaskan oleh Indah Sari, dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata” yang mana pada intinya mendefinisikan perbuatan melanggar hukum sebagai:

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang, melanggar hak subjek hukum lain, serta menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Dalam hal ini, pelaku wajib untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.⁵²

1.7.2.2 Unsur – Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Agar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, suatu perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan dalam konteks hukum tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat aktif, tetapi juga mencakup sikap pasif, yakni ketidakaktifan yang berasal dari

⁵⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 303

⁵¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melanggar Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3

⁵² Indah sari, *Perbuatan melanggar hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*, vol II No.1, September 2020, hlm 54

kesadaran akan kewajiban hukum untuk bertindak, namun sengaja diabaikan.⁵³ Dengan demikian, perbuatan hukum dapat berupa tindakan nyata maupun kelalaian untuk bertindak.⁵⁴ Sebagai ilustrasi, seseorang dapat dimintai ganti rugi apabila dengan sengaja membiarkan sebuah toko terbakar tanpa melakukan upaya apapun untuk memadamkan api, meskipun ia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian, dalam hal ini suatu perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian.⁵⁵

b. Perbuatan yang Melanggar Hukum

Sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mengalami perluasan makna.⁵⁶ Semula hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, kini cakupannya diperluas mencakup empat bentuk pelanggaran. Pertama, tindakan yang merugikan atau melanggar hak subjektif orang lain yang telah dijamin oleh hukum. Kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku. Ketiga, perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dan keempat, perbuatan yang tidak selaras dengan itikad baik serta kepatutan dalam

⁵³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 250.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 36

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.30.

⁵⁶ *Hoge Raad der Nederlanden*. (1919). Arrest Lindenbaum vs. Cohen, 31 Januari 1919 yang diakses pada 09 Mei 2025, pukul 11.00 di: <https://www.hetrechtstudentje.nl/jurisprudentie/eclinlhr1919ag1776-lindenbaum-cohen/>

kehidupan sosial, terutama dalam memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain.

c. Adanya Kesalahan Pelaku

Dalam ranah hukum perdata, unsur kesalahan (*schuld*) menjadi salah satu elemen penting yang harus dibuktikan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kesalahan dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, adanya niat jahat atau kesengajaan (*opzet*), di mana pelaku dengan sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kedua, kelalaian (*culpa* atau *negligence*), yaitu sikap abai terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi, padahal pelaku dapat memperkirakan atau mencegah akibat yang timbul. Ketiga, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), misalnya dalam keadaan terpaksa, pembelaan diri, atau kondisi psikis yang menyebabkan pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

d. Adanya Kerugian bagi Pihak Lain

Unsur kerugian (*schade*) merupakan unsur penting yang harus dibuktikan untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada aspek kebendaan, tetapi juga mencakup aspek non-kebendaan yang dapat dinilai secara uang. Undang-Undang Perdata serta doktrin hukum mengenali dua jenis kerugian, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian bersifat kebendaan, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan, atau kerusakan aset. Sedangkan

kerugian immateriil menyangkut penderitaan psikis, terganggunya kenyamanan hidup, kehormatan, atau rasa aman yang hilang akibat perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun tidak berwujud, kerugian immateriil dapat dikompensasi dalam bentuk uang berdasarkan penilaian kewajaran oleh hakim.⁵⁷

e. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal adalah hubungan sebab-akibat yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat kaitan antara suatu perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini menekankan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban, perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata bertujuan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.⁵⁸

1.7.3 Tinjauan Umum *Mislabeleding*

Mislabeleding merujuk pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelabelan suatu produk, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan ini dapat berupa informasi yang salah, tidak lengkap, atau menyesatkan yang tercantum pada label produk, seperti komposisi bahan, asal produk, kandungan gizi, tanggal kedaluwarsa, serta klaim kesehatan dan keamanan.

⁵⁷ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, hlm 83

⁵⁸ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melanggar Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013, hlm. 117.

Mislabeled dapat ditemukan di berbagai industri, termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumen lainnya.

Menurut kamus Merriam-Webster, *mislabeled* didefinisikan sebagai "*The act of labeling something incorrectly or inaccurately, especially in a way that is misleading or deceptive*".⁵⁹ Sementara itu, Cambridge Dictionary mendefinisikan *mislabeled* sebagai "*to attach the wrong label to something*".⁶⁰ Kesimpulannya, *mislabeled* berarti tindakan memberikan label yang keliru atau tidak akurat, terutama dengan cara yang berpotensi menyesatkan atau menipu. Dalam regulasi dan literatur hukum, *mislabeled* kerap dikaitkan dengan pelanggaran standar keamanan produk serta peraturan perlindungan konsumen. Dalam konteks regulasi dan literatur terkini, *mislabeled* sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum dan standar keamanan produk. Terdapat 10 (sepuluh) jenis *mislabeled*:

- a. *Mislabeled* pada Makanan : Terjadi ketika informasi pada kemasan makanan tidak mencerminkan isi produk secara akurat. Contohnya, produk yang diklaim sebagai vegetarian tetapi mengandung bahan hewani, atau produk berlabel "organik" yang tidak memenuhi standar organik yang berlaku.
- b. *Mislabeled* pada Produk: Terjadi ketika suatu produk diberi label yang tidak sesuai dengan karakteristik sebenarnya, misalnya bahan kulit sintetis yang diberi label sebagai "kulit asli."

⁵⁹Merriam-Webster, "*Mislabeled*", [webster.com/dictionary/mislabeled](https://www.merriam-webster.com/dictionary/mislabeled), diakses pada 6 februari.

⁶⁰Cambridge Dictionary, "*Mislabeled*", <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mislabeled>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 11.00.

- c. *Mislabeled* pada Kosmetik: Ketika produk kosmetik mencantumkan klaim yang tidak benar atau menyesatkan, seperti produk yang disebut "alami" tetapi mengandung bahan sintetis.
- d. *Mislabeled* pada Obat-Obatan: Terjadi ketika label obat tidak mencerminkan kandungan atau dosis yang sebenarnya, yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
- e. *Mislabeled* pada Produk Ramah Lingkungan: Terjadi ketika suatu produk dipasarkan sebagai ramah lingkungan, tetapi sebenarnya tidak memenuhi standar keberlanjutan atau tetap berdampak negatif terhadap lingkungan.
- f. *Mislabeled* pada Asal Negara: Ketika suatu produk diberi label berasal dari negara tertentu, padahal sebenarnya diproduksi di negara lain.
- g. *Mislabeled* pada Informasi Gizi: Ketika informasi gizi pada produk makanan tidak akurat atau menyesatkan, misalnya produk yang diklaim "rendah lemak" tetapi sebenarnya mengandung kadar gula yang tinggi.
- h. *Mislabeled* pada Berat Produk: Ketika berat yang tertera pada kemasan produk tidak sesuai dengan berat sebenarnya, misalnya kemasan kopi yang seharusnya memiliki berat 12 ons, tetapi hanya berisi 10 ons.
- i. *Mislabeled* pada Tanggal Kedaluwarsa: Ketika tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada suatu produk tidak akurat atau telah dimanipulasi dengan sengaja.

- j. *Mislabeled* pada Kesejahteraan Hewan: Ketika produk makanan diberi label berasal dari hewan yang dipelihara dalam kondisi layak, tetapi sebenarnya berasal dari hewan yang dipelihara dalam kondisi yang tidak manusiawi.⁶¹

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Konsep Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat merupakan konsep yang merujuk pada tanggung jawab dalam arti khusus (*liability* atau *aansprakelijkheid*). Istilah tanggung gugat ini mengacu pada kewajiban hukum yang muncul akibat perbuatan melanggar hukum. Marzuki menjelaskan bahwa tanggung gugat selalu didahului oleh adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga pelaku wajib bertanggung jawab secara hukum melalui gugatan di pengadilan. Dengan demikian, seseorang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Contohnya, pelaku diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik individu maupun badan hukum, karena melakukan perbuatan yang tidak sah (*onrechtmatige daad*).⁶²

Perbuatan melanggar hukum terjadi ketika satu pihak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh orang atau badan hukum lain. Oleh karena itu, tanggung gugat berada dalam

⁶¹ Jesse Langel, Esq., LL.M., “*Mislabeled vs. Misbranding: A Practical Guide with Examples*”, <https://www.thelangelfirm.com/debt-collection-defense-blog/2023/february/mislabeled-vs-misbranding-a-practical-guide-wit/>, diakses pada 9 Mei 2025, pukul 11.00

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 220

ranah hukum privat yang mengatur hubungan antar subjek hukum secara horizontal. Pandangan Peter Mahmud Marzuki ini sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata awal abad ke-20, J.H. Niewenhuis, yang menyatakan bahwa tanggung gugat adalah kewajiban menanggung kerugian akibat pelanggaran norma hukum. Menurut Niewenhuis, pelanggaran norma tersebut dapat berupa perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi dalam perikatan.⁶³

Lebih lanjut, Niewenhuis menguraikan syarat-syarat tanggung gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pertama, perbuatan yang menimbulkan kerugian harus bersifat melanggar hukum. Kedua, kerugian tersebut harus timbul secara langsung sebagai akibat dari perbuatan tersebut (hubungan kausalitas). Ketiga, pelaku perbuatan harus terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian (*schuld*). Keempat, norma yang dilanggar memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual, yang berarti hak yang lahir bersifat relatif dan hanya mengikat para pihak dalam kontrak tersebut. Dengan demikian, tanggung gugat merupakan bentuk khusus dari tanggung jawab hukum yang menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.⁶⁴

Dalam konteks ini, tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) menempatkan seseorang atau badan hukum pada posisi yang wajib memberikan ganti rugi setelah terjadi peristiwa hukum yang merugikan pihak lain. Moegni Djojodirdjo menambahkan bahwa tanggung gugat adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung kerugian yang menjadi objek sengketa hukum. Pihak

⁶³ Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1985, hlm. 118.

⁶⁴ Titin Rohayatin, *Birokrasi Pemerintahan*, Institute Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, 2021, hlm. 129.

yang bertanggung gugat adalah pelaku yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kesalahan atau risiko yang berujung pada kerugian bagi pihak lain.⁶⁵ Oleh karena itu, tanggung gugat tidak hanya didasarkan pada kesalahan, tetapi juga dapat timbul dari risiko yang melekat pada perbuatan tertentu.

1.8 Teori – Teori Penelitian

1.8.1 Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum.⁶⁶ Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat (4) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead, governmet for the people*).⁶⁷ Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma

⁶⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melanggar Hukum, Tanggung Gugat Untuk Kerugian Yang Di Sebabkan Karena Perbuatan Melanggar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 21.

⁶⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶⁷ Edi Hudiata, “Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 302.

dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.⁶⁸

Teori kepastian hukum berperan penting dalam menegakkan hukum perdata dengan memastikan pemulihan hak bagi konsumen yang dirugikan dan penegakan kewajiban pelaku usaha sesuai hukum. Kepastian hukum juga mencegah terjadinya konflik norma yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi atas pelanggaran, seperti *mislabeleding*.

1.8.2 Teori *Liability Based On Fault*

Liability based on fault atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan konsep fundamental dalam Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak tersebut.⁶⁹ Dalam konteks ini, kesalahan berarti adanya tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan standar kewajaran yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Konsep ini menekankan bahwa tidak semua kerugian yang terjadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, melainkan hanya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak yang bersangkutan.⁷⁰

Dalam kajian hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar antara *liability based on fault* dan *strict liability* (tanggung jawab mutlak). *Liability based on fault* mensyaratkan adanya kesalahan atau kelalaian sebagai dasar

⁶⁸ Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, & Bambang Daru Nugroho, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 1 Th. VIII, April 2020, hlm. 117.

⁶⁹ Goldberg, John C.P. dan Benjamin C. Zipursky, "The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability", *Fordham Law Review*, Vol. 73, No. 2, November 2004, hlm. 745

⁷⁰ *Ibid.*

pertanggungjawaban, sedangkan *strict liability* tidak memerlukan pembuktian kesalahan, melainkan cukup adanya kerugian yang timbul akibat aktivitas tertentu.⁷¹ Peran konsep kesalahan dalam sistem hukum perdata sangat penting karena menjadi dasar penentuan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep “*fault*” mempengaruhi bagaimana tanggung jawab hukum dibentuk dan diterapkan dalam berbagai yurisdiksi. Maka unsur kesalahan menjadi tolok ukur yang membedakan antara perbuatan yang dapat diterima dan yang melanggar hak pihak lain.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 746

⁷² Alhaj Hasan, Alissar, “The Concept of Fault”, *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Vol. 6, No. 3, Juli 2019, hlm. 49